

BAB I

PENDAHULUAN

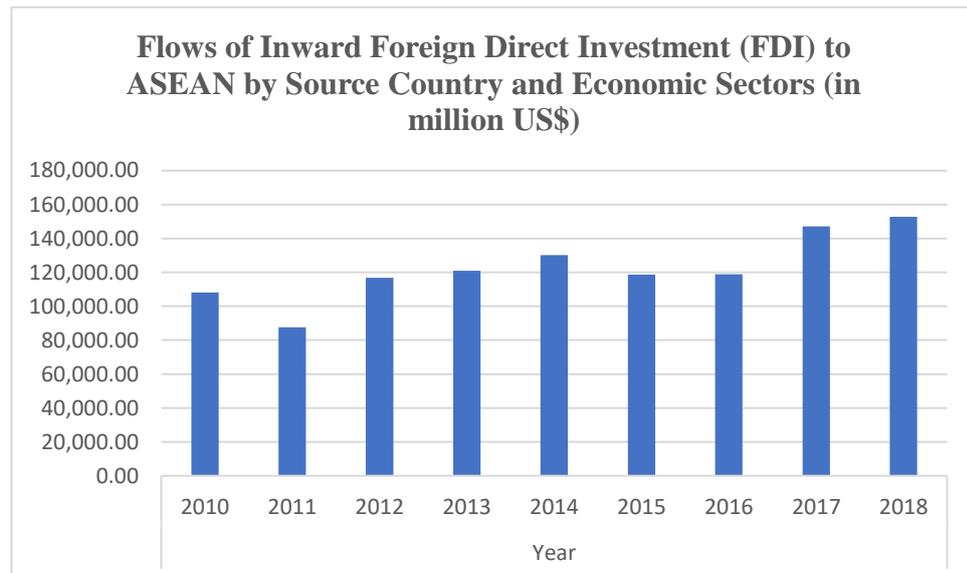
1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan integrasi keuangan internasional menghasilkan aliran modal besar-besaran ke negara-negara berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar dari aliran ini adalah dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI), ukuran *de facto* dari keterbukaan keuangan. Lebih penting lagi, menurut Lucke & Eichler (2015), FDI telah dianggap sebagai salah satu kegiatan ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia.

Untuk mendukung pertumbuhan investasi berupa arus modal internasional dan lokal dalam jangka panjang, diperlukan kebijakan-kebijakan yang menunjang iklim investasi negara yang bersangkutan seperti kebijakan makroekonomi yang tepat misal melalui kebijakan moneter, fiskal dan perdagangan (Zulfikar & Jayadi, 2017). Banyak faktor yang mempengaruhi masuknya investasi di antaranya adalah permasalahan mendasar iklim investasi seperti infrastruktur, tata kelola pemerintahan, tidak adanya hambatan birokrasi, kestabilan politik dan ekonomi, kepastian hukum, tersedianya konektivitas, terlatihnya SDM, hingga hukum bisnis dan kebijakan fiskal (Darussalam, 2015).

Arus investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) kian intensif memasuki Asia Tenggara di tengah-tengah perang dagang antara AS dan China. Pasalnya, sengketa dagang antara dua ekonomi terbesar di dunia itu telah memicu beberapa perusahaan mengalihkan produksinya ke kawasan ASEAN. Berdasarkan survei Bloomberg yang dilaksanakan pada 29 Agustus-5 September 2018, kawasan Asia Tenggara memang tampil sebagai kawasan yang dapat mengambil untung dari perang dagang. Pasalnya, kawasan tersebut menjadi tempat alternatif bagi perusahaan yang ingin merelokasi produksinya dari China untuk menghindari tarif. Sekitar sepertiga dari lebih dari 430 perusahaan AS di China telah atau tengah mempertimbangkan untuk memindahkan situs produksinya ke luar negeri akibat tensi dagang tersebut (Tari, 2018).

Berikut adalah data aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN selama tahun 2010-2018.

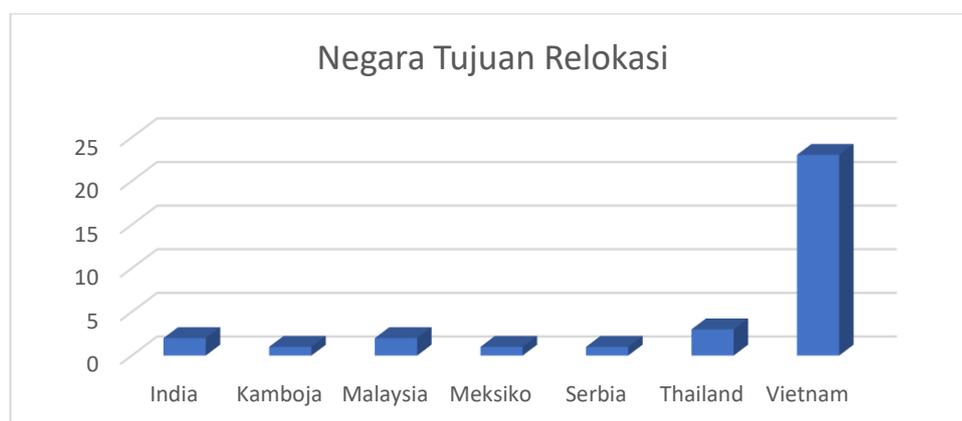


Sumber: <https://data.aseanstats.org/fdi-by-sources-and-sectors>

Gambar 1.1 Aliran FDI Di ASEAN Tahun 2010-2018

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) di ASEAN dari tahun 2010-2018 mengalami peningkatan yang cukup besar terutama pada tahun 2017 dan 2018. Tingginya aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) pada tahun 2018 kemungkinan disebabkan oleh banyaknya perusahaan asal AS yang merelokasi produksinya dari China ke kawasan ASEAN sebagai akibat dari perang dagang AS dan China.

Pada tahun 2019, efek dari perang dagang antara AS dan China juga menyebabkan 33 perusahaan harus merelokasi pabriknya dari China.



Sumber: <https://katadata.co.id/infografik/2019/09/17/33-perusahaan-keluar-dari-tiongkok-tak-satu-pun-ke-indonesia>

Gambar 1.2 Negara Tujuan Relokasi

Aditya Putra, 2020

PENGARUH INSENTIF PAJAK, KUALITAS INSTITUSIONAL DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI KAWASAN ASEAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dari 33 perusahaan yang melakukan relokasi, sebanyak 29 perusahaan melakukan relokasi ke wilayah ASEAN yaitu 23 perusahaan ke Vietnam, 3 perusahaan ke Thailand, 2 perusahaan ke Malaysia dan 1 perusahaan ke Kamboja. Sedangkan 4 perusahaan sisanya memutuskan untuk merelokasi pabriknya ke negara lain yaitu 2 perusahaan ke India, 1 perusahaan ke Meksiko dan 1 perusahaan ke Serbia. Banyaknya perusahaan yang melakukan relokasi pabriknya ke ASEAN tentunya membuat pertanyaan tersendiri mengenai faktor apa sajakah yang mempengaruhi aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke Asia Tenggara.

Banyak faktor yang mempengaruhi aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke suatu negara. Penelitian Economou, Hassapis, Philippas, & Tsionas (2017) yang bertujuan mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aliran FDI dengan sampel negara-negara yang tergabung dengan organisasi OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) dan beberapa negara berkembang menunjukkan hasil yang berbeda dari kedua sampel tersebut. Hasil temuan dengan sampel negara yang tergabung dengan OECD menunjukkan bahwa yang mempengaruhi aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) secara signifikan adalah ukuran pasar, pembentukan modal bruto, dan perpajakan perusahaan (Economou et al., 2017). Terlepas dari ukuran pasar, tarif pajak perusahaan jelas memengaruhi daya tarik FDI untuk negara-negara OECD, yang menunjukkan perlunya skema perpajakan yang lebih ramah terhadap investor. Namun, para pembuat kebijakan tidak hanya memperhatikan tingkat tarif pajak perusahaan tetapi mereka juga harus merancang sistem perpajakan yang sederhana, stabil dan transparan yang meminimalkan risiko bisnis yang relevan (Economou et al., 2017). Namun, hasil untuk sampel negara-negara berkembang menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi FDI adalah ukuran pasar, biaya tenaga kerja dan variabel kelembagaan (Economou et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Peres, Ameer, & Xu (2018) yang bertujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi aliran FDI dengan sampel negara maju dan berkembang juga menampilkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian dengan sampel negara maju memberikan bukti bahwa kualitas kelembagaan berdampak positif dan signifikan terhadap FDI di negara maju. Sedangkan hasil

untuk negara-negara berkembang menunjukkan bahwa dampak kualitas kelembagaan tidak signifikan karena lemahnya struktur lembaga (Peres et al., 2018). Selain itu, hasil penelitian Kumari & Sharma (2017) dengan sampel negara berkembang menunjukkan bahwa ukuran pasar, keterbukaan perdagangan, tingkat bunga dan sumber daya manusia menghasilkan koefisien signifikan dalam kaitannya dengan aliran masuk FDI untuk panel negara-negara berkembang yang diteliti (Kumari & Sharma, 2017). Lalu, hasil penelitian Owusu, Saat, Suppiah, & Law (2017) dengan sampel 116 negara berkembang menunjukkan bahwa adopsi IFRS dan kualitas institusional berpengaruh simultan terhadap peningkatan FDI. Terakhir, ada juga hasil penelitian Bimal (2017) dengan sampel negara-negara di Asia Selatan yang mayoritas terdiri dari negara-negara berkembang menunjukkan hasil bahwa ukuran pasar negara tuan rumah, keterbukaan terhadap perdagangan, efek aglomerasi, dan efektivitas pemerintah ternyata menjadi penentu FDI yang positif dan signifikan secara statistik di Asia Selatan (Bimal, 2017).

Beberapa hasil penelitian yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi aliran FDI di kawasan ASEAN memiliki hasil yang berbeda. Hasil penelitian Igamo (2015) menunjukkan bahwa PDB riil dan cadangan devisa memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap investasi asing di negara-negara ASEAN pada 2004-2013 (Igamo, 2015). Lalu, hasil temuan Xaypanya, Rangkakulnuwat & Paweenawat (2015) menunjukkan bahwa inflasi, saluran telepon, rasio perdagangan, ukuran pasar dan fasilitas infrastruktur secara signifikan menentukan aliran masuk FDI (Xaypanya et al., 2015). Kemudian, hasil penelitian Bahri, Nor & Nor (2018) menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan aliran FDI (Bahri et al., 2018). Selanjutnya, hasil penelitian Pertiwi & Nazar (2019) menunjukkan bahwa tarif pajak di suatu negara secara negatif mempengaruhi FDI dan adopsi IFRS oleh suatu negara memiliki efek positif pada FDI, sementara secara simultan tarif pajak dan adopsi IFRS memiliki pengaruh signifikan terhadap FDI (Pertiwi & Nazar, 2019). Terakhir, hasil temuan Tri, Nga & Duong (2019) menunjukkan bahwa ukuran pasar dan fasilitas infrastruktur berkorelasi positif dengan *Foreign Direct Investment* (Tri et al., 2019).

Dari berbagai hasil penelitian mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) ke suatu negara, terdapat dua faktor yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu faktor perpajakan dan kualitas institusional. Baik faktor perpajakan dan kualitas institusional dinyatakan memiliki pengaruh terhadap aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara maju dan tidak memiliki pengaruh terhadap aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) di negara berkembang. Kawasan ASEAN yang mayoritas diisi oleh negara-negara berkembang tentunya sangat cocok untuk dijadikan sampel untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh faktor perpajakan dan kualitas institusional terhadap aliran *Foreign Direct Investment* (FDI). Aspek perpajakan yang akan diteliti adalah aspek insentif pajak yang biasanya dijadikan senjata oleh negara-negara berkembang untuk menarik aliran *Foreign Direct Investment* (FDI). Sedangkan untuk aspek kualitas institusional sendiri, aspek yang diteliti adalah mengenai kualitas institusi yang ada di suatu negara dalam memberikan perizinan investasi dan memberikan kemudahan berbisnis untuk para investor. Berdasarkan laporan A.T. Kearney didalam *The 2019 FDI Confidence Index* menyatakan bahwa faktor utama yang menjadi penentu investor dalam memilih tempat investasi adalah tarif dan kemudahan dalam pembayaran pajak. Tarif statutory corporate income tax Indonesia berada di angka 25% dimana tarif ini menjadi yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Filipina dengan tarif 30%. Jika melihat persaingan tarif dan insentif pajak di ASEAN, Vietnam bisa dikatakan sebagai *emerging country* paling kompetitif dalam aspek tarif dan insentif pajak. Vietnam memiliki tarif *statutory corporate income tax* sebesar 20% yang menjadi tarif terendah ketiga setelah Singapura dan Brunei. Kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh Vietnam juga yang tertinggi di regional ASEAN jika diukur dari jumlah *tax deductions* dan *tax credits* yang diberikan berdasarkan laporan OECD *Investment Policy Review*. Selain itu, empat dari lima aspek teratas dalam menarik FDI berkaitan erat dengan aspek pemerintahan dan regulasi yang berkorelasi dengan aspek kualitas institusional. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan kunci dalam memacu FDI *inflows*. Menurut Sahoo, Nataraj, & Dash (2014), Institusi yang berkualitas baik kemungkinan merupakan penentu penting dari FDI, terutama untuk negara-

negara berkembang karena tata kelola yang baik dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang dapat menarik lebih banyak aliran FDI. Di sisi lain, institusi yang buruk yang memungkinkan korupsi cenderung menambah biaya investasi dan mengurangi laba. Ketiga, tingginya biaya FDI membuat investor sangat sensitif terhadap ketidakpastian, termasuk ketidakpastian politik yang muncul dari institusi yang buruk.

Selain dua faktor tersebut, faktor lain yang masih menarik untuk diteliti adalah faktor pembangunan infrastruktur. Dari hasil penelitian yang dilakukan di ASEAN menyatakan bahwa fasilitas infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap aliran FDI (Xaypanya et al., 2015; Tri et al., 2019). Sedangkan, hasil penelitian di Bahrain menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur ditemukan memiliki hubungan negatif namun tidak signifikan secara statistik dengan aliran masuk FDI (Mohammad & Gharaibeh, 2015). Lalu, hasil penelitian di Vietnam menunjukkan bahwa saluran telepon sebagai proksi untuk pembangunan infrastruktur cenderung menghalangi aliran masuk FDI (Trinh & Nguyen, 2015). Dari beberapa hasil penelitian tersebut masih terdapat hasil yang berbeda sehingga masih sangat menarik untuk meneliti faktor pembangunan infrastruktur terhadap FDI. Selain itu, sejak diberlakukannya MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) pada akhir tahun 2015, banyak negara di ASEAN yang berbenah dan saling bersaing dalam menjamin ketersediaan infrastruktur guna menarik daya tarik investor.

Dari uraian di atas, terdapat tiga faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu insentif pajak, kualitas institusional dan pembangunan infrastruktur. Ketiga faktor tersebut memiliki hubungan yang erat, dimana insentif pajak akan efektif jika regulasi dan birokrasi untuk memperolehnya berjalan baik dalam hal ini sangat bergantung pada kualitas institusional di negara tersebut. Sedangkan, pembangunan infrastruktur akan semakin banyak jika pemberian insentif pajak berjalan efektif untuk menarik investor. Karena jika pemberian insentif pajak tidak efektif, maka biaya yang dikeluarkan untuk memberi insentif pajak yang juga dapat mengurangi alokasi biaya untuk pembangunan infrastruktur akan menghambat pembangunan infrastruktur yang dapat menjadi daya tarik FDI. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh Insentif Pajak,

Kualitas Institusional dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN?”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa rumusan masalah yang dapat diangkat. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Insentif Pajak terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN?
2. Bagaimana pengaruh Kualitas Institusional terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN?
3. Bagaimana pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Insentif pajak terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kualitas Institusional terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pembangunan Infrastruktur terhadap *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademis, diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) Di Kawasan ASEAN. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu dalam penyelesaian penelitian-penelitian selanjutnya sebagai bahan referensi.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan terhadap Kementerian Keuangan dalam upaya analisis perbaikan iklim investasi di negara-negara yang berada di Kawasan ASEAN terutama di Indonesia guna meningkatkan aliran *Foreign Direct Investment* (FDI).